

BAB VI

SARAN

Saran yang dapat diberikan setelah menjalani Praktek Kerja Profesi di Apotek Kimia Farma 180 adalah sebagai berikut :

1. Sebelum memulai kegiatan PKPA, mahasiswa sebagai calon apoteker sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan tentang kegiatan kefarmasian di Apotek, seperti undang-undang kefarmasian, pengetahuan farmakoterapi dan manajemen Apotek, agar lebih kompeten dalam menjalankan tugas selama PKPA.
2. Apotek Kimia farma 180 disarankan untuk dapat meningkatkan penggunaan *Patient Medication Record* (PMR) sebagai salah satu wujud pelayanan kepada pasien juga untuk menjalankan peran Apoteker dalam memonitoring efek terapi pasien.
3. Penyampaian KIE kepada pasien perlu ditingkatkan agar pasien dapat memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan obat mulai dari indikasi, cara penggunaan obat, efek samping obat dan terapi nonfarmakologi sehingga pasien dapat memahami dengan jelas dan obat yang diterima pasien mampu memberikan efek terapi yang optimal.
4. Calon Apoteker diharapkan lebih berperan aktif dalam praktek kerja profesi di Apotek agar mendapatkan

pengetahuan dan keterampilan yang lebih banyak sehingga mampu mengetahui peran dan tanggung jawab Apoteker di Apotek dalam melayani sediaan farmasi kepada masyarakat.

5. Belum adanya penjelasan secara umum tentang sistem manajemen yang dimiliki oleh kimia farma karena bersifat berpusat sehingga diharapkan pada periode selanjutnya diberikan tentang materi manajemen keuangan dan pengelolaan apotek untuk kimia farma.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kesehatan RI. 1949. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Stb1, 1949 No. 419 Tentang Psikotropika*. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1965 tentang apotik*. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 1993. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perijinan apotek*. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 1997. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2002. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor. 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin apotek*. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian*. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*. Departemen Kesehatan RI: Jakarta.
- Departemen Kesehatan RI. 2014. *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Kementerian Departemen Kesehatan RI: Jakarta.

- Lacy, C. F., Armstrong, L. L., Goldman, M. P., Lanco, L.L. 2009. *Drug Information Handbook 17th ed.* Lexi-Comp, Inc., USA.
- McEvoy, G. K., 2011, *AHFS Drug Information Essentials*, Bethesda, USA.
- MIMS. 2016. Drugs information prescribing <http://www.Mimsasia.com/Indonesia/drug/info>.
- Raymond R. Tjandrawinata, PhD, MS, MBA, FRSC. 2013, *Medicinus: Dysmenorrhea and Endometriosis* Vol. 26 No.2. Indonesia. halaman 13.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2008, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Seto, S., N. Yunita., T. Lily, 2012, *Manajemen Farmasi*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Tatro, S. D., 2003, *A to Z Drug Facts, Facts and Comparisons*. USA, Katzung, 2007.